KESIAPAN PEREMPUAN MADURA DALAM MENGHADAPI INDUSTRIALISASI PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN MADURA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Nurul Widyawati IR
Dosen Tetap Jurusan Dakwah STAIN Jember

Abstract

The effect of building up Suramadu bridge toward Madurese women will be interesting to explore. Some scholars worry about the negative effect toward Madurese women post-building up the Suramadu bridge since it seems that Madurese women are potential workers. The result of the research shows that Madurese women should do what they have to do, in the sense that they should be ready to face what might be happen to them after the bridge had been erected. The industrialization post-building up Suramadu bridge will request many workers and especially women. And thus, there should be efforts to deal with the protection toward women-workers in Madura. There should also be empowerment toward women-workers in Madura which include reform of law, advocacy, and education.

Kata Kunci: Perempuan Madura, Industrialisasi dan Perspektif Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Madura adalah sebuah nama yang untuk kali pertama digunakan menyebut sebuah kerajaan yang kemudian bernama Bangkalan (terletak di wilayah barat pulau Madura). Nama Madura oleh Belanda selanjutnya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan pulau yang mereka tetapkan sebagai karesidenan madura pada tahun 1857 (Kuntowijoyo, 1977). Saat ini Madura terdiri atas empat kabupaten yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan merupakan salah satu wilayah yang ada di Propinsi Jawa Timur yang hanya berjarak 3 Km dan Surabaya. Penduduk Madura paling banyak bekerja di sektor pertanian dan nelayan (63,60%), sektor perdagangan (11,10%), industri (9,40%), dan jasa kemasyarakatan (7,60%) rendahnya partisipasi angkatan kerja di sektor industri karena terbatasnya industri di pulau Madura (LPM Brawijaya, 2003).

Bila ditinjau dari jenis kelamin, separuh lebih dari penduduk Madura adalah perempuan yang merupakan sumberdaya manusia potensial dalam pembangunan Madura. Apabila pembangunan jembatan *suramadu* yang menghubungkan pulau Madura dengan pulau Jawa selesai maka Madura akan mencapai laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, karena keberadaan pulau Madura yang selama ini terpisah dengan pulau Jawa menjadi alasan tersendiri bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di Madura. Karena itu disatu sisi keberadaan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa-Madura menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa kepentingan. Namun disisi lain, keberadaan jembatan ini dikhawatirkan beberapa kalangan akan mendatangkan masalah. Industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* akan menarik banyak tenaga kerja di bidang industri terutama perempuan Madura.

Oleh karena itu realitas banyaknya tenaga kerja Madura terutama perempuan menarik untuk dijadikan subjek penelitian. Berdasarkan data BPS tahun 2002 jumlah pencari kerja yang berjenis kelamin perempuan di Madura berjumlah 1.670.400 orang lebih besar 140.105 orang dibandingkan pencari kerja laki-laki. Hal ini terjadi menurut Kuntowijoyo (1977) dalam penelitiannya yang berjudul 'Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris : Madura 1850-1940" disebabkan karena Madura adalah bentukan ekologi "tegal" yang khas sehingga menyebabkan besarnya migrasi ke luar daerah, karena itu pada umumnya para lelaki Madura mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan ataupun merantau dan berdagang yang menyebabkan mereka meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, sehingga dalam kehidupan sehari-hari perempuan Madura memegang peranan penting dalam mengasuh dan mendidik anak selain melakukan pekerjaan domestik lainnya, sehingga timbul penghormatan terhadap ibu. Ini dapat dilihat pada kidung-kidung yang ada serta ungkapan Madura yang sangat terkenal *Bhupa', Bhabbu', guru, rato (Bapak,ibu, sesepuh, guru,dan raja)* yaitu suatu tingkatan dan cara penghormatan yang ada di Madura.

Realitas sosial ini menyimpan satu fakta bahwa perempuan Madura memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu upaya kajian yang lebih spesifik terhadap perempuan Madura menjadi penting artinya. Apalagi mengingat industrialisasi yang pasti terjadi sebagai akibat pembangunan jembatan *suramadu.*

Kecenderungan perempuan Madura untuk meninggalkan rumah pada dasawarsa ini meningkat pesat. Banyak dari mereka pergi ke kota-kota lain untuk bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang di berbagai pasar, pembantu rumah

tangga begitu pula yang pergi jauh hingga ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) meskipun dengan kemampuan pas-pasan dan pendidikan yang sangat rendah semakin membuktikan hipotesa bahwa peran perempuan Madura begitu dominan dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan sosial itulah sesungguhnya penelitian ini dilakukan, dengan harapan akan mampu memberikan jawaban dan fenomena sosial yang ada di Madura khususnya yang berkenaan dengan tingkat kesiapan perempuan Madura dalam menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu*. Melalui prespektif sosiologi hukum diharapkan akan dapat memfokuskan penelitian yang dilakukan. Dengan cara ini diharapkan persiapan-persiapan Madura untuk menghadapi era industrialisasi tersebut semakin lengkap, dan mengingat peran yang begitu besar dari Perempuan-perempuan Madura dalam menopang kehidupan keluarga (sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas) maka diharapkan penelitian ini akan dapat menyadarkan mereka akan kompleksitas era industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu*. Dengan demikian (dalam prespektif sosiologi hukum) penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi referensi perlindungan hukum bagi perempuan-petempuan Madura.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan sosiologi hukum, Untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam *Indepth interview* dengan tehnik *snow ball* untuk memperoleh data kesiapan perempuan Madura. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap upaya yang dilakukan terhadap perempuan Madura sehingga dapat diidentifikasi upaya yang dilakukan terhadap perempuan Madura dalam menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* dalam perspektif sosiologi hukum. Oleh karenanya dalam penelitian ini dilakukan 3 (tiga) tahapan penelitian yaitu tahap pralapangan, tahap kegiatan lapangan dan tahap analisis: *Pertama,* tahap Pralapangan. Dalam tahap pralapangan ini dilakukan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih informan. *Kedua,* tahap kegiatan lapang. Dalam tahap kegiatan lapang dalam penelitian ini dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri peneliti, memasuki lapangan peneliti berusaha bersikap pasif dengan berusaha melebur antara peneliti dengan informan, berperanserta. *Ketiga,* tahap analisis data. Tahap analisis data dilakukan

dengan menggunakan ketiga teori sebagai pisau analisis yaitu *legal theory, social action theory* dan kajian ramah gender dengan cara mereduksi data terhadap data yang diperoleh di lapangan yaitu kesiapan perempuan Madura dalam menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* dalam prespektif sosiologi hukum dan perlindungan hukumnya dengan ketiga teori tersebut, kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok. Untuk penyajian data dilakukan secara naratif, sedangkan selama penelitian berlangsung juga dilakukan verifikasi secara terus-menerus. Tehnik dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi data-data dan catatan-catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Madura

Madura yang letak geografisnya berada di daerah Jawa Timur bagian utara memanjang dari Barat ke Timur, memiliki luas wilayah ± 4591.90 Km2. Sementara itu pembagian wilayah administratif tiap-tiap Kabupaten terdiri dari 68 Kecamatan, 961 Desa, dan 27 Kelurahan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel Wilayah Administratif Madura

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Bangkalan	18	273	8
2	Sampang	12	180	6
3	Pamekasan	13	180	9
4	Sumenep	26	328	4
5	Jumlah Total	69	961	27

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Industrialisasi Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu

Ketika industri mulai berkembang di Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Perubahan ekonomi dan politik secara drastis merubah situasi perempuan dan cara merasakan situasi tersebut. Kebanyakan perubahan ini merupakan hasil transformasi signifikan ekonomi dan politik keluarga. proses produksi diorganisir melalui rumah tangga, dan kalangan keluarga bangsawan masih memiliki pengaruh politik yang penting meskipun sistem feodal telah digantikan oleh negara yang tersentralisir.

Era praindustri, sebagian besar perempuan terintegrasi secara solid dalam sistem kerja produktif yang diperlakukan untuk kelangsungan hidup keluarganya. Masa ini, perawatan anak dan segala sesuatu yang kita kenal dengan pekerjaan domestik hanya sebagian dari waktu kerja perempuan. Sebagai tambahan tugas domestik ini, sebagian besar perempuan memberi kontribusi penting untuk proses produksi pangan melalui beternak unggas dan lebah; membuat susu, menanam sayuran; mereka bertanggung jawab atas proses dan pengawetan pangan; memintal kapas dan wol lalu menjahit atau merajutnya menjadi pakaian; membuat sabun dan lilin, mengakumulasikan pengetahuan obat-obatan dan memproduksi ramuan tumbuh-tumbuhan yang manjur. Kontribusi penting perempuan bagi kelangsungan hidup masyarakat sangat jelas sehingga tidak ada alasan untuk mempertanyakan kembali tempat perempuan dalam masyarakat sebagai kenyataan alamiah.

Dampak industrialisasi, bersamaan dengan tumbuhnya negara demokrasi, meruntuhkan dan merombak total hubungan tradisional yang telah terumuskan oleh masyarakat praindustri. Industrialisasi mentransformasi keluarga dan mengacaukan posisi tradisional perempuan. Perempuan dari kelas yang lebih tinggi kehilangan kekuatan politiknya dengan kemunduran posisi keluarga aristokratis dan tumbuhnya negara demokrasi. Demikian pula perempuan dari kelas yang lebih rendah. Industrialisasi telah memindahkan kerja tradsional perempuan di rumah tangga ke pabrik. Sekalipun, banyak perempuan bekerja di pabrik khususnya awal periode industrialisasi. Kerja tradisional yang dimaksudkan ialah kontrol perempuan dikurangi pada industri vital seperti pengolahan makanan, tekstil, dan garmen. Penurunan kontribusi perempuan dalam rumah tangga kemudian meningkatkan ketergantungan mereka pada suami dan melemahkan kekuatannya berhadapan dengan suaminya.

Indonesia sebagai Negara berkembang melihat pertumbuhan materiil tersebut sebagai suatu syarat mutlak untuk pembangunan yang berhasil dan pembangunan jembatan *suramadu* yang menghubungkan antara Madura dan Surabaya (Jawa) adalah salah satu wujud proses pembangunan yang pada akhirnya mengarah pada industrialisasi dimana juga akan merubah situasi perempuan Madura sebagai hasil dari adanya industrialisasi itu sendiri.

Proses industrialisasi dan kemajuan tehnologi informasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* dapat dipastikan akan membawa dampak pada perubahan sosial pada masyarakat Madura terutama peranan perempuan Madura dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah perempuan Madura yang bekerja di luar rumah akan semakin meningkat, diikuti semakin meningkatnya jumlah perempuan

Madura yang akan menjadi tulang punggung keluarga.

Madura pasca pembangunan jembatan *suramadu* dalam pengembangan industri di Madura merupakan penataan dan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pertumbuhan industri berdasarkan sumberdaya atau potensi yang dimiliki, penguatan struktur sistem usaha industri dan upaya penguatan inkorporasi antar jenis industri dan mitra jenis industri menuju sistem usaha industri daerah yang handal dan mandiri.

Menyongsong selesainya pembangunan jembatan *suramadu*, penelitian kesiapan perempuan Madura menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* dalam prespektif sosiologi hukum adalah salah satu bagian penting dikatenakan perempuan Madura merupakan tenaga kerja potensial yang jumlahnya lebih besar dari jumlah laki-laki di Madura sehingga diperlukan persiapan dan upaya yang signifikan dalam menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu*.

Pembangunan jembatan *suramadu* dipastikan akan berdampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Madura.. Industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* akan menarik banyaknya tenaga kerja di bidang industri, termasuk perempuan Madura. Berdasarkan data BPS tahun 2002 di 4 (empat) kabupaten di Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep jumlah pencari kerja yang berjenis kelamin perempuan di Madura berjumlah 1. 670.400 orang lebih besar 140.105 orang dibandingkan pencari kerja laki-laki Madura. Sehingga pembangunan jembatan *suramadu* menjadi bagian yang sangat penting dalam mengintegrasikan pembangunan daerah khususnya di Madura. Terwujudnya pembangunan jembatan *suramadu* menjadi salah satu faktor penunjang dan katalisator industrialisasi yang ramah lingkungan dengan mengarah pada keunggulan kompratif serta meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Jembatan *suramadu* yang mulai dikerjakan sejak tanggal 27 Mei 2005 diperkirakan akan selesai pada tanggal 27 Mei 2008 . Apabila ini benar-benar terealisir maka hanya dengan waktu 36 bulan, maka jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura benar-benar telah rampung dikerjakan. Tujuan dari pekerjaan pembangunan jembatan *suramadu* adalah untuk mensejahterakan masyarakat Madura dan membuka peluang arus perdagangan dan industri di pulau Madura yang akhirnya akan membawa peningkatan harkat hidup dan kesejahteraan masyarakat Madura. Bila melihat dari tujuan ini maka industrialisasi pasca pembangunan jembatan itu tidak dapat dihindarkan lagi. Karena, tidak

dapat dipungkiri bahwa meski telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, empat kabupaten di Madura masih belum menunjukkan kemajuan yang memadai. Indikator ke arah itu ditunjukkan oleh nilai rataan laju pertumbuhan ekonomi empat kabupaten pada tahun 2005 sebesar 4,075 % yang relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Selain itu, prosentase rataan penduduk miskin di empat kabupaten di Madura pada tahun 2005 sebesar 44,3 % dan cenderung mengalami peningkatan.

Pembangunan Jembatan *suramadu* dianggap sebagai jawaban atas persoalan inefisiensi. Hal ini cukup beralasan karena jembatan *suramadu* akan menjadi salah satu pemacu pembangunan di Madura, utamanya di bidang ekonomi yang akan diproyeksikan sebagai kawasan Industri dan pelabuhan sehingga diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan per kapita masyarakat.

Pembangunan jembatan *suramadu* dapat dipastikan akan berdampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Madura, mulai dari aspek ekonomi dan mata pencaharian, sosial budaya, sampai pada cara pandang hidup masyarakat. Untuk melakukan pendekatan dan guna mengantisipasi dampak besar yang dapat ditimbulkan tersebut harus ada perlindungan bagi semua pihak termasuk di dalamnya adalah perempuan Madura.

Dengan selesainya pembangunan jembatan *suramadu* diperkirakan jumlah tenaga kerja perempuan Madura yang akan memasuki sektor industri akan lebih bertambah lagi yaitu sebesar 43 % dan akan meningkat setiap tahunnya karena perempuan Madura yang berada atau akan berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW akan mengurungkan niatnya atau kembali pulang disebabkan industrialisasi yang pasti terjadi pasca pembangunan jembatan. Sebagian besar akan terserap dalam industri pengolahan yaitu sektor industri yang menuntut ketelitian, ketekunan dan sifat lain yang dimiliki perempuan seperti, industri rokok, tekstil, konveksi, makanan dan minuman yang notabene bertehnologi rendah namun, selanjutnya pekerjaan yang pada awal berdirinya industri (hasil penelitian di beberapa wilayah industri seperti Cibinong, Rungkut dan Batam) menjadi pekerjaan laki-laki lambat laun akan diganti menjadi tenaga kerja perempuan yang upahnya lebih rendah dengan jenis pekerjaan yang sama.

Hal tersebut merupakan konsekwensi dari pergeseran komposisi lapangan pekerjaan bagi perempuan Madura, bergesernya lahan pertanian menjadi lahan industri pasca pembangunan jembatan *suramadu* akan menyebabkan perempuan Madura beralih bekerja ke sektor industri modern. Setelah masuknya perempuan

Madura ke dalam sektor industri modern tersebut acapkali hasil yang diperoleh jauh dari yang diharapkan, upah rendah, diskriminatif, eksploitatif dan bahkan terjadi marginalisasi, yang lebih parah hal ini biasanya dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai strategi untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan penurut.

Kesiapan Perempuan Madura dalam Menghadapi Industrialisasi

Pada mulanya seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan modernisasi dan industrialisasi telah membuka peluang-peluang baru dan keahlian-keahlian baru yang memungkinkan perempuan untuk memasukinya. Terdapat banyak jenis pekerjaan publik yang membutuhkan peran perempuan secara spesifik, namun kehadiran perempuan profesional ini tidak jauh berbeda dengan tenaga kerja perempuan yang tergolong un-skill. Tenaga kerja perempuan berada dalam posisi biner antara laki-laki dan perempuan dengan segala implikasinya yang tak jauh berbeda.

Baik di kalangan terdidik maupun yang tidak terdidik, apresiasi terhadap perempuan masih saja berada dalam *stereotip* yang memprihatinkan, lebih-lebih jika perempuan berada dalam peran-peran sebagai pembantu, dan munculnya berada di belakang pekerja utama. Para perempuan profesional yang berfungsi sebagai pekerja pembantu misalnya sekretaris, asisten dan lain-lain tidak juga keluar dari pandangan masyarakat yang kurang menghargai.

Dalam konstruksi sosial posisi pembantu berada dalam posisi subordinat, akibatnya akan terjadi pengaburan terhadap nilai pekerjaan tersebut. Posisi subordinat yang paling tua adalah posisi perempuan, pribadi yang dilekatkan adalh pribadi stereotip perempuan, kualifikasi yang dilekatkan pun kualifikasi perempuan karena merekalah yang dianggap sebagai pembantu. Posisi subordinat dalam struktur apapun potensial untuk dirampas hak dan martabatnya

Secara nasional jumlah penduduk perempuan adalah lebih tinggi daripada jumlah penduduk laki-laki, begitu pula di Madura, kecenderungan ini terus berlanjut dimana prosentase jumlah penduduk perempuan di Madura terus meningkat. Perempuan yang bekerja tak ubahnya menghancurkan mitos laki-laki bekerja dan merupakan kritik terhadap peran kepala rumah tangga yang belum memenuhi standar minimal kebutuhan, dengan bekerja perempuan Madura merasa lebih mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian saat ini batas wilayah antara perempuan pesisir, pedesaan dan perkotaan sudah sangat kabur, sudah tidak ada dikotomi diantara ketiganya dikarenakan perempuan Madura adalah subjek penelitian yang

dinamis dimana representasi sosio kultural perempuan Madura ternyata sangat erat berkaitan dengan *silang sengkarut* perubahan, pergeseran dan juga berbagai perubahan yang disebabkan oleh beberapa kondisi eksternal yang pengaruhnya sangat signifikan yaitu migrasi, budaya konsumsi, ekspansi kapitalisme global dan pembangunan.

Industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* juga akan lebih menampilkan kedinamisan perkembangan perempuan Madura yang berani menembus sekat-sekat mapan bahkan mungkin dapat ditangkap sebagai sebuah sinyalemen bahwa setiap representasi senantiasa akan memunculkan resistensi, sebuah gerak dan cara pandang yang mampu menggerogoti stabilitas konstruksi yang selama ini menempatkan perempuan Madura sebagai entitas sosio kultural yang beku.

Industrialisasi akan membawa perempuan Madura mampu menyuarakan tentang pentingnya reinterpretasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak selamanya berbau patriarkhis.

Kuantitas perempuan Madura yang bekerja semakin meningkat, bahkan ada yang menjabat sebagai Kepala Dinas, anggota legislatif dan pedagang yang sukses. Saat ini mulai terjadi pergeseran konsep bekerja, sebelumnya bekerja identik dengan pegawai negeri, tetapi saat ini bekerja di sektor swasta termasuk menjadi anggota legislatif juga dianggap sebagai bekerja. Yang memicu hal tersebut salah satunya adalah Bupati dan DPRD Kabupaten Sumenep dan Bangkalan yang berasal dari pesantren.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Madura Menghadapi Industrialisasi

Perempuan bekerja di sektor publik karena sebagai manusia mereka membutuhkan aktualisasi diri. Di samping itu perempuan juga merupakan tenaga kerja yang produktif, tetapi akibat ideologi gender yang patriarkhis membuat perempuan tidak dapat melepaskan diri dari marginalisasi, sangat jelas dalam sistem kapitalisme dan industrialisasi tidak ada pembagian kekuasaan karena akan dimonopoli yang kuat, tidak ada pembagian sarana produksi dan tidak ada kebebasan untuk membuat pilihan, kedudukan perempuan makin terpuruk.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini merupakan perwujudan dan kewajiban Pemerintah untuk memberikan bentuk perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Tenaga kerja baik

laki-laki maupun perempuan mendapat perlindungan yang sama, seperti waktu kerja dan waktu istirahat, upah, syarat-syarat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagainya.

Industrialisasi akan menciptakan kesempatan besar bagi perempuan Madura untuk masuk ke dalam sektor industri modern. Namun, di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan angkatan kerja perempuan, pada umumnya masih rendah. Sekitar 63,07 % angkatan kerja hanya berpendidikan maksimum Sekolah Dasar (SD). Sebab itu sebagian angkatan kerja perempuan hanya dapat memasuki perusahaan padat karya yang mengutamakan kemampuan fisik daripada kemampuan intelektualnya.

Jumlah pencari kerja di Madura adalah 3.200.695 jiwa, Dari jumlah ini 1.670.400 adalah perempuan dan 1.530.295 adalah laki-laki. Laju persentase angkatan kerja perempuan juga lebih tinggi yakni 3,61% untuk perempuan dan 2,53% untuk laki-laki. Maka bagaimana potensi perempuan Madura tersebut yang sedemikian besar, secara kuantitatif itu, dapat dibina, diarahkan menjadi kualitatif dan ditransformasikan secara aktual. Yakni dalam wujud nyata peran sertanya sebagai elemen pendukung dalam pembangunan menuju industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu*, tanpa meninggalkan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan dapat melalui 2 sektor yaitu: *Pertama*, sektor Formal. Bagi perempuan untuk menjamin agar dalam melakukan berbagai fungsi kodrati, tidak memberi dampak yang merugikan dalam hubungannya dengan pekerjaan maka berbagai perlindungan harus dilakukan. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa fungsi reproduksi pada perempuan merupakan fungsi sosial, yang akan memberi warna pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Norma perlindungan tenaga kerja perempuan pada umumnya yang ada sampai saat ini secara substantif mencakup lingkup yang cukup luas seperti pembatasan kerja pada waktu-waktu tertentu, pada jenis pekerjaan tertentu, pelbagai cuti karena berperannya fungsi reproduksi, kemudahan dan fasilitas bagi tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi tersebut serta penghapusan perbedaan perlakuan yang menyangkut pengupahan ataupuan aspek-aspek lainnya. Apabila dikaji lebih jauh dan saksama, perlindungan ini mempunyai tujuan untuk menjaga agar tenaga kerja dapat hidup layak sebagai manusia serta membuat kerja lebih manusiawi. Sebagaimana disadari bahwa kerja merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia. Dari kerja yang dilakukannya sescorang mengharap akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah dari imbalan yang diterima atau kerja yang dilakukan. Dengan imbalan dari kerja itu pula diharapkan

dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupannya yang pada gilirannya menempatkan pada status sosial tertentu, yang akan memberikan kepuasan pada dirinya. *Kedua,* Sektor Informal. Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan perempuan serta keberhasilan program keluarga berencana. Salah satu kelemahan angkatan kerja perempuan Madura adalah pendidikannya yang relatif masih rendah, yaitu 63,07 % berpendidikan SD ke bawah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut, sebagian besar angkatan kerja wanita bekerja pada lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya dan produktivitas rendah, yang selanjutnya juga berakibat tingkat pendapatan rendah. Kenyataan ini banyak kita jumpai di daerah pesisir maupun pedesaan, terutama di sektor industri tradisional. Seperti misalnya usaha pembuatan kain batik, pembuatan krupuk atau petis dan sebagainya. Biasanya kegiatan ini dilakukan di rumah atau sistem kerja rumah. Sistem kerja semacam ini sudah lama dipraktikkan, namun belum ada pendataan yang lengkap di bidang ini.

Strategi Pembebasan Perempuan Madura dari Diskriminasi dalam Industrialisasi

Dari uraian di atas, diperoleh gambaran bahwa dunia perburuhan Indonesia yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi industrialisasi di Madura masih menunjukkan hubungan sosial industri yang patriarki dan bias gender. Untuk itu dibutuhkan agenda yang penting dan strategis dalam upaya memberdayakan *(enpowerment)* tenaga kerja perempuan, yaitu meliputi hal-hal berikut : *Pertama, Reform of Law,* pembaruan hukum dengan didukung oleh penelitian tentang hubungan perburuhan yang kondusif. Di samping itu tidak kalah pentingnya dibutuhkan formulator kebijakan yang mempunyai keberpihakan pada hubungan perburuhan yang emansipatif. *Kedua, Advocacy,* yaitu mengenalkan sejak dini kepada tenaga kerja perempuan Madura bentuk-bentuk penanganan kasus-kasus perburuhan yang bias gender. Peran ganda perempuandalam hal dimana tidak ada perempuan yang dibayar untuk melakukan pekerjaan domestik, pada hal pekerjaan ini esensial demi keberlangsungan industri dan hidup. Bagi perempuan miskin yang bekerja untuk upah yang begitu rendah, dan harus mengerjakan pekerjaan rumah pula, ini jelas merupakan beban yang bertumpang tindih. Status pernikahan juga problematis, karena sering dipakai dasar untuk diskriminasi. Status pernikahan memungkinkan akumulasi modal, tetapi diselubungi kebijakan sosial tanpa harus mempertahankan hubungan gender yang tidak seimbang.

Dalam sektor ekonomi, kerentanan perempuan terhadap eksploitasi berlaku universal. Secara individu maupun secara massa, perempuan dieksploitasi oleh perusahaan, biasanya ditunjang negara. Lepas landas ekonomi yang bergantung pada industrialisasi, tengah berlangsung di atas pundak buruh perempuan yang hak-haknya paling dasar pun kadang tidak terpenuhi (Suryakusuma, 1992; Safa'at, 1991). *Ketiga,Education*, pendidikan penyadaran hak-hak buruh perempuan yang dijamin oleh konvensi intemasional dan hukum perburuhan nasional secara "kritis", di samping kesadaran tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik dan konstalasi perburuhan di Indonesia. Untuk ini dapat dilakukan melalui: Media Massa, Latihan Paralegal, Pendidikan Hukum dan penyuluhan hukum, Seminar, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Proses industrialisasi dan kemajuan tehnologi informasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* dapat dipastikan akan membawa dampak pada perubahan sosial pada masyarakat Madura terutama peranan perempuan Madura dalam keluarga dan masyarakat. Jumlah perempuan Madura yang bekerja di luar rumah akan semakin meningkat, diikuti semakin meningkatnya jumlah perempuan Madura yang akan menjadi tulang punggung keluarga.

Menyongsong selesainya pembangunan jembatan *suramadu,* penelitian kesiapan perempuan Madura menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* dalam prespektif sosiologi hukum adalah salah satu bagian penting dikarenakan perempuan Madura merupakan tenaga kerja potensial yang jumlahnya lebih besar dari jumlah laki-laki di Madura sehingga diperlukan persiapan dan upaya yang signifikan dalam menghadapi industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu.*

Pembangunan jembatan *suramadu* dapat dipastikan akan berdampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat Madura, mulai dari aspek ekonomi dan mata pencaharian, sosial budaya, sampai pada cara pandang hidup masyarakat. Untuk melakukan pendekatan dan guna mengantisipasi dampak besar yang dapat ditimbulkan tersebut harus ada perlindungan bagi semua pihak termasuk di dalamnya adalah perempuan Madura. Dengan selesainya pembangunan jembatan *suramadu* diperkirakan jumlah tenaga kerja perempuan Madura yang akan memasuki sektor industri akan lebih bertambah lagi yaitu sebesar 43 % dan akan meningkat setiap tahunnya karena perempuan Madura yang berada atau akan berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW akan mengurungkan niatnya atau kembali pulang

disebabkan industrialisasi yang pasti terjadi pasca pembangunan jembatan.

Industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* pada akhirnya juga akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang atau tidak berpihak pada perempuan (*gender blind atau gender bias*). Pekerjaan di sektor formal yang akan tercipta berkaitan dengan industrialisasi seringkali akan dikuasai oleh laki-laki karena sumber daya perempuan Madura yang tersedia tidak memenuhi kriteria maka pihak-pihak yang menguasai kekuatan sosial, ekonomi akan menciptakan marginalisasi terhadap perempuan, kapitalisasi yang tercipta dalam industrialiasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* akan menjadi beban kelompok yang tidak memiliki posisi tawar tinggi yaitu perempuan Madura karena itu persoalan diskriminasi, eksploitasi dan marginalisasi akan menjadi persoalan yang selalu melekat pada kelompok ini dengan adanya industrialisasi. Industrialisasi bagi perempuan Madura tidak hanya akan menjadi persoalan di ranah domestik tetapi juga dalam ranah publik. Ketika perempuan Madura masuk ke sektor publik dengan menjadi buruh pabrik maka buruh di sektor formal tersebut merupakan kelompok yang paling banyak akan disentuh tentang pemberdayaan, termasuk pemberdayaan buruh perempuan.

Dalam proses ini perlu dilakukan upaya membebaskan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk individu dari segala kemasan yang berlatar belakang penjajahan dan penindasan. Pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan dukungan untuk perempuan penting diupayakan sebagai proses mendudukkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Perlu ada perubahan cara memandang ideologi gender, perubahan ini membuka stereotip dengan mengedepankan kehidupan yang *equal* antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia.

Industrialisasi pasca pembangunan jembatan *suramadu* juga akan lebih menampilkan kedinamisan perkembangan perempuan Madura yang berani menembus sekat-sekat mapan bahkan mungkin dapat ditangkap sebagai sebuah sinyalemen bahwa setiap representasi senantiasa akan memunculkan resistensi, sebuah gerak dan cara pandang yang mampu menggerogoti stabilitas konstruksi yang selama ini menempatkan perempuan Madura sebagai entitas sosio kultural yang beku.

Perubahan struktur industrialisasi juga akan mengakibatkan pekerjaan domestik bergeser ke publik, kembali laki-laki akan menggeser posisi perempuan. Pekerjaan seperti memasak, menjahit, *house keeping* dan sebagainya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki selama pekerjaan itu memberikan *income* dan bukan pekerjaan kewajiban kerumahtanggaan. Perempuan akan dihadapkan pada ketidakberdayaan

menentukan pilihan, industrialisasi akan menciptakan kesempatan besar bagi perempuan Madura untuk masuk ke dalam sektor industri modern. Namun, di lain pihak, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan angkatan kerja perempuan, pada umumnya masih rendah. Sekitar 63,07 % angkatan kerja hanya berpendidikan maksimum Sekolah Dasar (SD). Sebab itu sebagian angkatan kerja perempuan hanya dapat memasuki perusahaan padat karya yang mengutamakan kemampuan fisik daripada kemampuan intelektualnya yang akhirnya akan terjadi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Perempuan dijadikan objek membentuk pola konsumsi baru. Pekerjaan domestik yang diserahkan kepada perempuan akan membuat perempuan menjadi penentu dalam pola konsumsi keluarga. *Kedua*, perempuan merupakan buruh murah. Banyak perusahaan industri yang membutuhkan pekerja yang teliti. Perempuan sudah dikonstruksi menjadi manusia yang harus teliti, oleh karena itu buruh perempuan dibutuhkan oleh perusahaan yang membutuhkan ketelitian. Tapi, di sisi lain perempuan dianggap tidak produktif dan pekerja yang tidak serius karena fungsi biologisnya (haid, hamil dan menyusui). Atas dasar keadaan tersebut, masyarakat dan pengusaha menilai perempuan sebagai pekerja kelas dua sehingga sudah selayaknya mendapat upah rendah. *Ketiga*, Tubuh Perempuan dijadikan barang dagangan *(trafficking in women)*. Industrialisasi menggunakan kecantikan perempuan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Industri kosmetik menjadi bertambah besar karena mitos ini. Pada segi lain dalam keluarga miskin semua anak dituntut untuk bekerja. Anak-anak perempuan sudah dikalahkan oleh budaya dalam pendidikan, juga mendapat tuntutan yang sama dengan saudara laki-lakinya. Akhirnya jalan pintas diambil salah satunya adalah perempuan menjadi komoditas dagang dan diperjual belikan. Pemiskinan perempuan secara besar-besaran jelas mempunyai implikasi sosial-ekonomi yang serius, dan juga terhadap hak-hak asasi lainnya: Kesehatan, hak mendapat kontrasepsi, pendidikan. hak memiliki *property*, mobilitas, kebebasan untuk mengikuti kegiatan politik atau budaya. ini akan menciptakan suatu lingkaran setan di mana perempuan tidak punya peluang memperbaiki nasib sehingga pelembagaan perempuan sebagai koloni terselubung berlangsung terus. *Keempat*, pariwisata dan Perdagangan seks. Industri pariwisata juga akan berkembang, tetapi di sisi lain juga harus diwaspadai akan terjadi perubahan besar-besaran terhadap pola konsumsi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja kurang terampil, pelecehan tradisi budaya dan upacara keagamaan, pelacuran dan pengrusakan lingkungan hidup. Tempat wisata akan menarik perempuan muda Madura bekerja juga karena tuntutan keluarga dan mereka harus menyesuaikan

diri dengan tata kehidupan global dengan berbagai implikasinya.

Kelima, pengaruh dari perempuan ke anak-anak. Sejak dalam kandungan anak-anak sudah dipengaruhi masyarakat konsumtif melalui ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Yentriyani, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan,* Galang Press, Yogyakarta.

A. Subaharianto, Latief Wiyata, Kusnadi, Nawiyanto, Samsu, B. Mulyadi, D. Parwata, Sunarlan, 2004, *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur,Menjunjung Luhur,* Bayumedia, Malang.

Ann Brooks, 1997, *Posfeminisme dan Cultural Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif,* terjemahan S. Kunto Adi Wibowo, Jalasutra, Yogyakarta.

A. Nunuk P. Murniati, 2004, *Getar Gender Buku Pertama (perempuan Indonesia dalam prespektif sosial, politik, ekonomi, hukum dan HAM),* Indonesiatera, Magelang.

A. Nunuk P. Murniati, 2004, *Getar Gender Buku Kedua (perempuan Indonesia dalam prespektif agama, budaya dan keluarga),* Indonesiatera, Magelang.
Bangkalan dalam Angka 2005/2006

Benda, Harry J. 1962. *The Strukture of Southest of Asian History, Some Preleminary Observation* JSAH, Vol. III, No I.

Bhasin Kamla, 1996, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan,* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Chhachhi, Amrita. 1989, *"Konsep-konsep Dalam Teori Feminis; Konsensus dan Kontroversi"* Dalam Mohammad P. & Shepherd (eds), *Gender in Carribean Development. Jamaica,* Trinidad, Tobago and Barbados: Univ. Westindes, Women and Development Studies Project.

Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media".* LKIS, Jogjakarta.

Griffen, Venessa. 1989. *"Women, Development and Empowerment: a Pacific Feminist",* A Report of the Pacific Women's Work Shop, Kuala Lumpur: Noboutini, Fiji, Asia Pacific Development Centre.

Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian,* UMM Press, Malang.

Hesti R Wijaya, 2004, *Perdagangan Internasional, Perekonomian Pedesaan dan Perempuan dalam Era Globalisasi.* Dalam Lisa Hadiz, 2004, Perempuan Dalam Wacana Politik Orde baru, Pilihan Artikel Prisma, LP3ES, Jakarta.

Hesti R. Wijaya, 1993, *"Perlindungan Sosial pada Perempuan Homeworkers: Riset Aksi Pemberdayaan Perempuan Untuk Mengubah Kondisi Kerjanya"*, Makalah Pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian, Oktober 1993, Cibulan, DIKTI.

Ida Ekawati dan Indah Dwi Qurbani, *Upaya Pencegahan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak*, Seminar Pengarusutamaan Gender dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumenep, tanggal 27 September 2005.

Ihromi, 1991, *Situasi Hukum di Indonesia tentang Perempuan dan Dampaknya Terhadap Perempuan*, Makalah Lokakarya Kemandirian Perempuan Indonesia, KSW - Unibraw, 18—20 Juli 1993 Malang.

Ihromi, 1993, *Beberapa Catatan Mengenai Kerangka Pemikiran yang Telah Berkembang Dalam Kajian Wanita*, makalah Seminar Nasional Pengembangan Studi Wanita, Pengembangan Studi Wanita dan Pembangunan di Indonesia: KSW FISIP UI-VENA, 19—21 Agustus, Jakarta.

Indah Dwi Qurbani, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Seminar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, tanggal 23 Juli 2005.

Indah Dwi Qurbani, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Seminar Kohati Cabang Sumenep, 10 Oktober 2005.

Iskandar Zulkarnain, 2003, *Sejarah Sumenep*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.

Kuntowijoyo, 2002, *Madura, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris*, Mata Bangsa, Yogyakarta.

L.M. Gandhi Lapian, Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi utara)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mailing Oey, 2004, *Perubahan Pola Kerja Kaum Perempuan di Indonesia Selama Dasawarsa 1970 Sebab dan Akibatnya*, Dalam Lisa Hadiz, 2004. Perempuan Dalam Wacana Politik Orde baru, Pilihan Artikel Prisma, LP3ES. Jakarta.

Miles,M.B. and A.M. Huberman.1992, *Analisis Data Kualitatif*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), Qualitative Data Analysis, UI Press. Jakarta.

Parson, Talcott, 1974, *The Structure of Social Action*, New York, The Free Press.